

Peran Guru PPKn dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di MAN 1 Pontianak

Suryo Pamilu ^{a,1}, Achmadi ^{b,2}, Thomy Sastra Atmaja ^{c,3}

^a Universitas Tanjungpura, Indonesia

¹ suryopamilu99@gmail.com *

*korespondensi penulis

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh guru PPKn dalam meningkatkan partisipasi politik siswa sebagai pemilih pertama kali. Para peneliti menggunakan teknik penelitian kualitatif yang mencakup pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, tinjauan pustaka, dan dokumentasi. Pendekatan analisis data terdiri dari tiga langkah: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Tes kredibilitas digunakan untuk menilai kebenaran data. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa: (1) Peran guru PPKn dalam membina partisipasi politik mahasiswa sebagai pemilih pemula melalui kegiatan pembelajaran di MAN 1 Pontianak dilaksanakan melalui rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), pelaksanaan pembelajaran PPKn, dan evaluasi hasil pembelajaran. (2) Guru PPKn berperan membina partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula di luar kelas dengan menyelenggarakan kegiatan pemilihan Ketua Kelas, Ketua Kelompok Belajar, dan Ketua OSIS di MAN 1 Pontianak. Dalam pelaksanaannya, ketua OSIS dipilih dengan suara terbanyak, begitu pula ketua kelas, dan ketua kelompok belajar dipilih berdasarkan kesepakatan.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the influence of PPKn teachers in encouraging political involvement of students as first-time voters. The researchers used qualitative research techniques that include a descriptive approach. Data collection methods include interviews, observations, literature reviews, and documentation. The data analysis approach consists of three steps: data reduction, data presentation, and inference. Credibility tests are used to assess the veracity of the data. The research findings revealed that: (1) the role of PPKn teachers in fostering student political participation as beginner voters through learning activities in MAN 1 Pontianak was carried out through the learning implementation plan (RPP), the implementation of PPKn learning, and evaluation of learning outcomes. (2) PPKn teachers play a role in fostering political participation of students as beginner voters outside the classroom by organizing election activities for Class Leaders, Study Group leaders, and student council leaders in MAN 1 Pontianak. In practice, the student council president is elected by majority vote, as well as the class president, and the head of the study group is elected by agreement.

Pendahuluan

Partisipasi politik dalam masyarakat demokratis menunjukkan bahwa rakyat telah menjalankan kewenangan negara terbesar yang sah menurut hukum (kedaulatan rakyat), terbukti dengan keikutsertaannya dalam pesta Demokrasi (pemilu) (Muntoha, 2009). Budiarto (dalam Fitriani, 2020) mendefinisikan keterlibatan politik sebagai partisipasi aktif individu atau kelompok dalam kehidupan politik, termasuk pemilihan pemimpin negara dan pengaruh langsung atau tidak langsung dari kebijakan pemerintah (H. 3). Menurut Dahrendorf, seperti dikutip dalam jurnal Morissan, setiap orang yang tinggal di negara demokratis berhak mengungkapkan pandangan dan sikapnya terhadap segala sesuatu yang terjadi di ruang publik atau hal-hal yang menyangkut kepentingannya agar pemerintah sadar dan tanggap (Willeck & Mendelberg, 2022, hlm. 89).

Informasi Artikel

Diterima : 05 November 2024

Disetujui: 13 Desember 2024

Kata kunci:

Peran Guru PPKn, Partisipasi Politik, Pemilih Pemula

Article's Information

Received: 05 November 2024

Accepted: 13 December 2024

Keywords:

The Role Of PPKn Teachers, Political Participation, Beginner Voters

Berdasarkan hal tersebut, partisipasi politik sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu negara dalam sistem demokrasi, karena berdampak signifikan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa dan memberikan kontribusi suara dalam menentukan kepemimpinan negara yang ingin memerintah dalam pemilihan umum. Namun, pada kenyataannya, tidak sedikit warga negara yang memiliki tingkat pemahaman yang buruk dalam keterlibatan politik, terutama status warga negara sebagai pemilih baru yang akan mulai aktif berpartisipasi dalam proses politik (Lilleker & Ozgul, 2021). Pemilih pemula berkisar antara usia 17 hingga 22 tahun, yaitu siswa Sekolah Menengah Pertama (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Generasi muda masa kini mengutamakan kepentingan pribadinya (Mebane, 2021). Akibatnya, bahkan dalam konteks politik, generasi baru ini kurang memiliki pemahaman dan kesadaran (Myers, 2019). Akibatnya, langkah-langkah harus dilakukan untuk menghindari demi meningkatkan kesadaran politik dalam bentuk keterlibatan politik langsung dalam kehidupan nasional dan negara bagi individu yang kompeten (Myers, 2019). Untuk mengatasi rendahnya keterlibatan politik warga sebagai pemilih pemula, diperlukan pendidikan yang lebih khusus dalam pembelajaran politik atau pendidikan politik (Oser, 2022). Pendidikan politik merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman individu terhadap politik agar dapat aktif terjun ke dunia politik (Byun et al., 2022). Menurut Rusadi Kantaprawira, politik merupakan salah satu tugas lembaga politik yang bertujuan untuk mengembangkan kesadaran politik masyarakat dan memungkinkan mereka untuk terlibat secara maksimal dalam sistem politiknya (Riswan, 2022).

Menurut data awal yang diperoleh peneliti dari wawancara dengan salah satu guru Pendidikan Kewarganegaraan di MAN 1 Pontianak, Bapak Fandri Minandar, M. Pd, tingkat partisipasi politik siswa di MAN 1 sendiri tergolong cukup baik, terbukti dengan partisipasi politik siswa dalam pemilihan ketua OSIS di MAN 1. Lebih lanjut, ia menyatakan, dengan diadakan kegiatan tersebut dapat menginspirasi siswa untuk ikut serta dalam kontestasi politik di Kalbar yaitu pada pilkada Kalbar tahun 2024, mengingat kedudukannya sebagai pemilih baru. Dari data yang diketahui Bapak Fandri Minandar, M. Pd mengenai tingkat partisipasi politik siswa di Man Pontianak cukup baik dilihat dari antusiasme siswa di MAN 1 Pontianak dalam melaksanakan pemilihan ketua OSIS, dalam simulasi pembelajaran di kelas, bahkan Bapak Fandri Minandar, M. Pd menyempatkan diri bertanya kepada siswa Kelas XII tentang penggunaan hak suara dalam kontestasi politik tahun 2024 dan siswa dapat dikatakan sangat antusias menyambutnya karena akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali.

Hal ini sejalan dengan apa yang Bapak Fandri Minandar, M. sebutkan. Ia menyatakan, untuk memperkuat upaya keterlibatan politik siswa sebagai pemilih pemula, diperlukan pendidikan politik di kelas melalui Pendidikan Kewarganegaraan secara teori, praktik, atau simulasi pembelajaran politik, serta analisis kasus politik kontekstual. Dalam upaya meningkatkan keterlibatan politik siswa, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MAN 1 Pontianak telah menciptakan latihan pembelajaran yang menarik yang dapat menjadi motivator bagi siswa. Pak Fandry mengklaim bahwa untuk mempromosikan keterlibatan politik siswa, digunakan metode pembelajaran yang inovatif, serta adaptasi terhadap pembelajaran online kontemporer. Dengan demikian, pendidikan politik sangat penting bagi warga sebagai pemilih pemula untuk membangun kesadaran politik. Pemilih pemula adalah generasi muda yang akan terlibat dalam kontestasi politik di bangsanya (Riswan, 2022). Berdasarkan hal tersebut, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi wadah pendidikan politik dalam konteks lembaga pendidikan resmi.

Alhasil, Pendidikan Kewarganegaraan berperan kritis dan memiliki tujuan pendidikan politik, yaitu menanamkan pengetahuan tentang kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dalam kerangka pendidikan formal. Tentu saja, keterlibatan politik oleh warga negara sangat penting bagi keberadaan bangsa dan negara. Menurut Somantri (2001, hlm. 279), Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan

untuk mendidik warganegara yang baik, yang dapat didefinisikan sebagai patriotik, toleran, setia kepada bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati.

Metode

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian tentang "peran guru PPKn dalam membina partisipasi politik mahasiswa sebagai pemilih pemula" (Lu, 2022) menggunakan pendekatan kualitatif ini. Karena pendekatan kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif dari pengamatan perilaku sendiri, khususnya peran guru pendidikan kewarganegaraan terhadap perilaku siswa dalam hal partisipasi politik, maka hal tersebut sejalan dengan masalah yang akan dibahas peneliti mengenai peran guru pendidikan kewarganegaraan dan partisipasi politik. (Cruz & Graham, 2022). Peneliti menggunakan metodologi studi deskriptif untuk mengkaji bagaimana instruktur PPKn membantu mahasiswa yang merupakan pemilih baru berpartisipasi dalam politik. Di MAN 1 Kota Pontianak yang beralamat di Jalan H. Haruna, Sungai Jawi dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78244, peneliti melakukan penyelidikannya. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi dan uji validitas data adalah dua contoh prosedur analisis data.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan temuan studi tentang pengaruh guru PPKn dalam meningkatkan keterlibatan politik pemilih pemula di MAN 1. Pontianak merupakan proses pembahasan dan analisis hasil Lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data. wawancara, observasi, dan dokumen yang akan dihubungkan dengan berbagai hipotesis dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan selanjutnya akan diperoleh sebuah kesimpulan:

Peran Guru PPKn dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Melalui Kegiatan Pembelajaran

Berdasarkan temuan lapangan yang dilakukan bahwa pelaksanaan pendidikan politik untuk menumbuhkan partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula di MAN 1 Pontianak salah satunya dengan mengintegrasikan nilai-nilai partisipasi politik ke dalam setiap mata pelajaran khususnya pelajaran PPKn, sesuai dengan (Wahab dan Sapriya, 2011, h. 315), dijelaskan bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan agar siswa memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab. Salah satu indikasi warga negara yang baik adalah partisipasi aktif dalam pendidikan politik di suatu negara, baik secara langsung dengan mendukung partai politik dan menjadi pemegang kekuasaan maupun secara tidak langsung dengan menjadi bagian dari komunitas yang berkecimpung dalam kehidupan politik di negara tersebut.

Indikator dan tujuan pembelajaran yang disediakan dalam dokumen RPP PPKn telah diintegrasikan ke dalam topik PPKn Pendidikan Politik dalam rangka mendorong keterlibatan politik siswa sebagai pemilih pemula. Menurut Peraturan No. 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu sesi atau lebih. Sebagai guru pada umumnya, ia menginginkan pembelajaran yang dilakukannya berhasil, sehingga salah satu faktor keberhasilannya adalah mempersiapkan pembelajaran yang dilakukan melalui penerbitan RPP, sehingga guru selalu dirumuskan oleh guru PPKn MAN 1 Pontianak dalam musyawarah guru mata pelajaran (MGMP).

Guru PPKn bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembelajaran dilakukan dengan tepat. Sebagaimana menurut (Wuryan dan Syaifullah, 2008, hlm. 41-42) menjabarkan jenis-jenis guru salah satunya adalah guru yang berdedikasi dan guru yang berpengetahuan luas yaitu guru yang selalu menyiapkan rencana pembelajaran yang akan dikerjakan, dan selalu selalu mendorong siswa

untuk berpikir kritis, berperilaku dan berperilaku demokratis, selalu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran untuk mengendalikan ruang kelas dengan tertib mengajar dan selalu menciptakan iklim yang sehat dan menyenangkan siswa.

Pembimbing PPKn sangat penting untuk memahami perkembangan yang ingin meningkatkan keterlibatan politik siswa, karena menurut Soedijarto (Subhan dan Asep, 2019, hlm. 9), PPKn merupakan pendidikan politik yang bertujuan membantu siswa menjadi warga negara yang matang secara politik. Berdasarkan hasil evaluasi guru PPKn terhadap RPP, dapat disimpulkan bahwa langkah awal dalam menentukan KI dan KD dalam RPP adalah dengan memperhatikan silabus dan struktur kurikulum yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui prosedur kementerian.

KD dipilih dan disesuaikan dengan konten yang akan diberikan kepada siswa kelas. Data tersebut didukung oleh temuan dokumen yang dilakukan oleh peneliti tentang RPP PPKn yang dibuat oleh guru PPKn di MAN 1 Pontianak, yang menunjukkan bahwa pemerintah menyiapkan silabus, serta KI dan KD yang sebelumnya disiapkan oleh Kemendikbud. Setelah KD teridentifikasi, dikembangkan indikator dan tujuan pembelajaran yang diturunkan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Setelah indikator dikembangkan, tujuan pembelajaran disusun sebagai turunan dari indikator pencapaian untuk mencapai indikator tersebut. Menurut (Soemantri, 2010, h. 28), tujuan PPKn adalah mendidik warganegara baik yang patriotik, toleran, setia kepada bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati.

Mengenai metode pembelajaran yang digunakan guru PPKn yang menerapkan nilai partisipasi politik di MAN 1 Pontianak, menurut guru PPKn yaitu dengan metode yang disesuaikan dengan materi dan kondisi serta karakter siswa di kelas, seperti menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, pengusaan, dan praktik simulasi pemilu di kelas yang diselenggarakan oleh siswa itu sendiri.

Guru PPKn menerapkan nilai-nilai partisipasi politik sebagai pemilih pemula dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk hadir di kelas saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, sehingga siswa dapat bergiliran menjelaskan hasil pembahasannya kepada teman dan guru. Hasil pembahasan dihimpun sebagai tahap penilaian yang dilakukan guru pada tahap selanjutnya dalam pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai partisipasi politik sebagai upaya menumbuhkan partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula di MAN 1 Pontianak pada kegiatan penutupan siswa diminta untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian guru memberikan klarifikasi jika ada pemahaman siswa yang tidak

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dalam upaya mendorong keterlibatan politik siswa sebagai pemilih pemula dilakukan melalui penggunaan strategi pembelajaran nilai yang menggabungkan prinsip-prinsip partisipasi politik serta pendekatan ilmiah. Selanjutnya, guru berupaya menawarkan pengalaman langsung kepada siswa agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik, yaitu dengan mengadopsi pendekatan percontohan penyelenggaraan simulasi partek pemilihan umum (pilkada) di kelas.

Peran Guru PPKn dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Melalui Kegiatan di Luar Pembelajaran

Hasil penelitian bahwa kegiatan bertema politik di MAN 1 Pontianak, seperti pemilihan ketua kelas, ketua kelompok belajar, dan ketua OSIS dari pengamatan bahwa guru PPKn selalu memberikan teladan yang baik dalam mengajar di dalam kelas dan di luar kelas sejalan dengan itu (Beti, dkk, 2016. h. 66-67), mengungkapkan pentingnya pendidikan politik yang diterapkan dalam pendidikan formal, yaitu Pendidikan Politik dan pendidikan formal bertujuan agar Kesadaran politik (political awareness) dapat terbentuk dan tumbuh pada diri siswa sejak usia muda jika memiliki pemahaman dasar politik.

Dengan demikian, pendidikan politik bagi siswa juga bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran siswa dalam kehidupan politik.

Sedangkan faktor yang lebih menentukan guru dalam upaya membina partisipasi politik ditandai dengan hasil wawancara dengan guru PPKn yang menyatakan bahwa faktor utama dalam membina partisipasi politik peserta didik adalah pembelajaran yang dapat menumbuhkan kesadarannya dalam berpolitik; pembelajaran ini tidak selalu harus pembelajaran di kelas, misalnya dengan diadakannya pilkada Kesadaran akan partisipasi politik. Menurut Surya (2020), pemilihan ketua OSIS sangat penting dalam meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjalankan hak demokrasi dalam menjalankan kegiatan demokrasi di sekolah dengan memotivasi siswa lain untuk terlibat dalam kegiatan positif yang dapat memberikan respon baik di sekolah. dan di masyarakat melalui partisipasi aktif dalam semua kegiatan yang ada. Ini menguntungkan semua orang (hal.50).

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Milbarth (Maran, 2013, hlm. 156-157) menyatakan bahwa terdapat empat faktor utama yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut karena adanya perangsang, karena faktor karakteristik pribadi seseorang, faktor karakteristik sosial seseorang, dan faktor lingkungan politik itu sendiri. Pendapat tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan siswa faktor Kelas XII. Aspek penting dalam mengembangkan keterlibatan politik adalah memiliki teman-teman yang mungkin diajak bicara politik saat mengikuti kegiatan sekolah, khususnya pemilihan OSIS, atau dalam skala yang lebih luas, yaitu di masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor upaya pembinaan partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula yaitu guru dan sekolah yang memberikan pendidikan politik yang baik dan benar yang dapat menumbuhkan kesadaran politik siswa melalui pembelajaran yang memberikan pengajaran langsung kepada siswa tentang partisipasi politik dengan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dan perlu diintegrasikan ke dalam tujuan sekolah untuk berpartisipasi aktif dalam politik.

Simpulan

Menurut temuan kajian yang dilakukan oleh akademisi di MAN1Pontianak, fungsi guru besar Ppc dalam mengembangkan keterlibatan politik pemilih pemula di kalangan siswa adalah sebagai berikut:

Guru Ppc berperan meningkatkan keterlibatan politik siswa sebagai pemilih pemula di MAN 1 Pontianak dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran(RPP), pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Upaya guru antara lain (a) mencontohkan kepada siswanya dalam menanamkan nilai-nilai moral dan demokrasi, (b) memberikan pengetahuan dan pemahaman politik, (c) mengarahkan siswa dalam menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, dan (d) mengawasi, memantau, dan meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Guru PPKn memiliki peran kunci dalam mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan sikap siswa tentang politik di MAN 1 pontianak.

Peran guru PPKn dalam membina partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula di luar pembelajaran adalah dengan memberikan praktik langsung kepada siswa tentang partisipasi politik dengan kegiatan penunjang seperti pemilihan ketua kelas, ketua kelompok belajar, dan pemilihan ketua OSIS. dilakukan secara demokratis melalui pemilihan umum yang dilakukan, sehingga dapat diintegrasikan ke dalam tujuan sekolah untuk penciptaannya.

Referensi

- Abdul Azis Wahab & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: CVAAlfabeta
- Beti, E. 2016. Pengaruh Kompetensi, Disiplin, dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Morowai. *Jurnal Katalogis*. Vol. 4. No. 8.
- Cruz, C., & Graham, B. (2022). *Social ties and the political participation of firms. The Review of International Organizations*, 17, 1–26. <https://doi.org/10.1007/s11558-021-09420-6>.
- Fitriani. *Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Payaraman Kab. Ogan Ilir pada Pemilu tahun 2019*, UIN Raden Fatah, Palembang, 2020.
- Gatara, Asep Sahid & Subhan Sofian. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) pendidikan politik, nasionalisme, dan demokrasi*. Bandung: Fokusmedia
- Lu, J. (2022). *Political Participation and Varying Understandings of Democracy*. 133– 168. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197570401.003.0006>
- Maran, R. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Muntoha. (2009). *Demokrasi dan Negara Hukum. Jurnal Hukum*. 3(16), 379-395.
- Muntoha. (2009). *Demokrasi dan Negara Hukum. Jurnal Hukum*. 3(16), 379-395.
- Myers, J. (2019). *Political Participation*, 90–111. Byun, J., Choi, T., Kim, M., & Jeong, Y. (2022). *The Effect of Depression on Political Participation. Journal of Critical Social Welfare*, 74, 271–296. <https://doi.org/10.47042/ACSW.2022.2.74.271>. <https://doi.org/10.4324/9781351006705-6>.
- Ozgul, B. (2022). Does Green Transformational Leadership Develop Green Absorptive Capacity? The Role of Internal and External Environmental Orientation. *Systems*, 10(6), 224.
- Patel, A., Hirschhorn, L., Fullem, A., Ojikutu, B., Oser, R. (2010). *Adult Adherence To Treatment And AIDS In Care*. Arlington: VA:USAIDS. Retrieved from http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADX307.pdf
- Riswan, M. (2022). *Political Participation: A Political Sociological Abstraction. Shodhwardama: Advanced Research in Arts, Science, Humanities and Social Sciences*, 58–69.
- Somantri, M. N. 2001, *Menggagas Pembaharuan Pendidikan PKn*. Bandung: Remaja Rosda Karya dan PPS UPI
- Surya, W. (2020). Pemilihan Ketua OSIS dalam Membangun Kesadaran Siswa Untuk Menggunakan Hak Demokrasi Di SMA Negeri 7 Binjai. *Jurnal Serunai Pancasila dan Kewarganegaraan. STKIP Budidaya Binjai*. 9(1), 1-9.
- Willeck C, Mendelberg T. (2022). Education and Political Participation. *Annual Review of Political Science*, Vol. 25
- Wuryan, Sri dan Syaifullah. (2008). *Ilmu Kewarganegaraan (Civic)*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan